

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanggamus, dengan melakukan pengumpulan data pada objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder dalam runtun waktu (*time series*), yaitu periode tahun 2006 – 2010 sedangkan data yang akan diolah adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Tanggamus dan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanggamus.

Data sekunder yang diperoleh dalam bentuk laporan tahunan dari masing-masing dinas yang terkait dengan kepentingan data penelitian ini.

Untuk menunjang penulisan ini digunakan juga metode kepustakaan guna mencari literatur yang mendukung tema penulisan.

## **B. Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan dari objek penelitian.

### **1. Analisis Deskriptif Kualitatif**

Yaitu dengan menganalisa dan menafsirkan data dengan menggunakan teori-teori pendukung sehingga dapat memberikan gambaran umum dari pengelolaan Dana Perimbangan terhadap Penerimaan Daerah KabupatenTanggamus.

### **2. Analisis Kuantitatif**

Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tanggamus dalam hubungannya dengan Dana Perimbangan maka digunakan alat analisis berupa pengukuran derajat desentralisasi fiskal (Reksohadipodjo, 2000), yaitu:

$$\text{Rumus 1} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

- Semakin besar nilai persentase PAD terhadap TPD maka semakin besar pula kemandirian fiskal suatu daerah.

$$\text{Rumus 2} = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

- Semakin besar nilai persentase BHPBP terhadap TPD maka semakin besar kemandirian fiskal suatu daerah.

$$\text{Rumus 3} = \frac{DAU}{TPD} \times 100\%$$

- semakin besar nilai persentase rasio DAU terhadap TPD maka ini berarti semakin besar pula ketergantungan fiskal suatu daerah.

Dimana  $TPD = PAD + BHPBP + DAU$

Ket : PAD = Pendapatan Asli Daerah  
 BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak  
 DAU = Dana Alokasi Umum  
 TPD = Total Penerimaan Daerah

### C. Gambaran Umum Tempat Penelitian

#### 1. Geografis

Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 5 15 LS- 6 0' LS dan 105 0 BT - 105 45' BT, dengan luas wilayah mencapai 3.406 km dengan ibukota Kota Agung. Di Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa institusi perusahaan pertambangan swasta yang memiliki izin operasional eksplotasi dan eksplorasi pertambangan baik galian C maupun pertambangan rakyat dan ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara administratif meliputi 21 kecamatan yaitu meliputi 337 pekon dan 5 kelurahan , 114 desa diantaranya merupakan desa tertinggal (BPS, 2009). Letak Geografis Kabupaten Tanggamus Sebelah Barat berbatasan dengan Lampung Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Semaka. Sedangkan etnis penduduknya selain penduduk asli di Kabupaten Tanggamus berbaur penduduk pendatang seperti suku Jawa, Sunda, WNI Keturunan, etnis Batak dan etnis Bali.

## **2. Penduduk**

Keadaan penduduk yang berdomisili di Kab. Lampung Tanggamus dari bermacam-macam bermacam-macam suku dan etnis dari seluruh Indonesia, dan penduduk pendatang lebih besar datang dari pulau Jawa selain akibat perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan serta adanya program pemerintah melalui transmigrasi dimasa kemerdekaan. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2009 berjumlah 1.562.435 jiwa, yang terdiri dari 802.317 laki-laki dan 760.391 jiwa perempuan. Dengan tingkat sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 107,4 persen, dengan tingkat pendapatan perkapita tiap tahunnya sebesar 1,92 persen. Kabupaten Tanggamus dalam penerimaan DAU selalu teletak diperingkat tiga besar dalam penerimaan DAU dari pemerintah pusat dibandingkan dengan kabupaten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa potensi fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki Kabupaten Tanggamus cukup besar.

**Tabel 6. Perkembangan Penduduk dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>	<b>Pendapatan Perkapita (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2006	1.111.358	-	727.367	-
2007	1.128.912	1,58	731.695	0,60
2008	1.133.180	0,38	749.936	2,49
2009	1.562.435	0,82	774.065	3,22
2010	1.162.708	1,77	799.584	3,29
<b>Rata-rata</b>		<b>0,91</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1,92</b>

*Sumber :BPS Kab. Tanggamus (data diolah)*

Tabel 6. menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat di Kab.Tanggamus tiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 0,91 persen dan pendapatan perkapita yang mengalami perkembangan sebesar 1,92 persen. Selain dari bidang perdagangan, sektor pariwisata menjadi pendukung unggulan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanggamus yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, wisata tirta, dan wisata pantai yang diharapkan dapat memberikan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ini.

#### **D.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **Kabupaten Tanggamus**

Umumnya struktur penerimaan APBD Kab. Tanggamus masih didominasi bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang lebih besar dari Penerimaan Asli Daerah itu sendiri.

**Tabel 7. PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Tanggamus  
Tahun Anggaran 2006 – 2010.**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Dana Perimbangan (Rp)</b>
2006	9.328.117.063	301.270.102.232
2007	10.137.612.707	431.610.451.340
2008	15.637.731.069	531.621.621.643
2009	16.728.728.116	602.904.580.420
2010	18.306.917.225	675.928.320.737

*Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanggamus 2011*

PAD Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata 14,58 persen demikian halnya dengan Dana Perimbangan atau transfer pusat dengan belanja tiap tahunnya selalu mengalami perkembangan rata-rata sebesar 17,16

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk anggaran belanja operasional pegawai, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Setelah memenuhi kebutuhan rutin daerah sisa DAU dialokasikan pada Belanja Modal dan Pembangunan dengan demikian DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sehingga efisiensi dan efektifitas dari penggunaan DAU sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah.